

**REPRESENTASI KEKUASAAN MELALUI SABDA RAJA PADA TEKS BERITA
MENGENAI KONFLIK INTERNAL KERATON YOGYAKARTA
(SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS)¹**

Sumarlam

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta
sumarlamwd@gmail.com

ABSTRACT

This paper presents the results of news text analysis about internal conflicts in Keraton Yogyakarta (KIKY) by using Norman Fairclough's critical discourse analysis approach as a major theory. The study includes a description (text analysis), interpretation (discourse practices), and the explanation (social practices). The results are as follows. (1) Structure of news KIKY text was built by four units of discourse: the headline, orientation, sequence of events, closing. The positive ideology of the conflicting sides and the institutions (government, experts) are represented through the modalities and positive sentences. Meanwhile, negative ideology are represented by prohibition speech and negative sentences. (2) The events of what happened, who was involved, what is the relationship with the issues raised, and the role of language can be expressed through the interpretation of the discourse practices. (3) The situation when the news text was produced, the influence of the institution (conflicting sides involved) to the text produced, and the condition of the people of Yogyakarta Palace related to economic, political, social, and cultural interests; all of them can be explained by their socio-cultural context.

ABSTRAK

Makalah ini memaparkan hasil analisis teks berita mengenai konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta (KIKY) dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai pijakan utama. Kajiannya mencakupi deskripsi (analisis teks), interpretasi (praktik wacana), dan eksplanasi (praktik sosial). Hasilnya sebagai berikut. (1) Struktur teks berita KIKY dibangun oleh empat unit wacana: judul berita, orientasi, *sequence of events*, penutup. Ideologi positif kubu yang bertikai dan pihak institusi (pemerintah, pakar) direpresentasikan melalui modalitas dan kalimat positif. Sementara itu, ideologi negatif direpresentasikan melalui tuturan melarang dan kalimat negatif. (2) Peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, apa hubungan dengan isu yang diangkat, dan apa peran bahasa dapat dikemukakan melalui interpretasi terhadap praktik wacana. (3) Situasi ketika teks berita diproduksi, pengaruh institusi (kubu yang terlibat) terhadap teks yang diproduksi, dan kondisi masyarakat Keraton Yogyakarta terkait dengan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya; semuanya itu dapat dieksplanasi berdasarkan konteks sosio-kulturalnya.

Kata kunci: *representasi kekuasaan, sabda raja, analisis wacana kritis, teks berita, konflik internal*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Konflik internal di Keraton Yogyakarta (KIKY) dipicu oleh keputusan Raja (sabda raja atau *sabda dalem*) Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X (HB X). Sabda raja tersebut terkait dengan dua hal. *Pertama*, perubahan nama HB X, dari Sultan Hamengku

¹ Makalah disajikan dalam *Seminar Internasional PRASASTI III* yang diselenggarakan oleh Program Studi Linguistik, Pascasarjana UNS bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Surakarta, 2 – 3 Agustus 2016.

Buwono menjadi Sultan Hamengku Bawono; dan dari GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Kedua, pengangkatan GKR Pembayun (putri pertama HB X) menjadi Putri Mahkota, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja di Keraton Yogyakarta (*Kompas.com*, 30/4/2015; *Tribunnews.com*, 6/5/2015). Pemicu utama KIKY adalah sabda raja yang kedua tersebut sehingga adik-adik dari HB X sangat kecewa atas sikap raja yang dianggap merombak peraturan (*paugeran*) yang ada. Permasalahan belum selesai, KIKY makin mengeras dan situasi makin memanas ketika kelompok (kubu) penentang sabda raja mengukuhkan Gusti Bendara Pangeran Haryo Prabokusumo, adik tiri HB X, sebagai Raja Keraton Yogyakarta.

Sangat menarik untuk dikaji, bagaimana representasi kekuasaan pascasabda raja tersebut setelah terjadi perebutan kekuasaan dan bagaimana solusi terhadap KIKY itu? Siapa saja pelibat wacana yang ikut 'bermain' dalam KIKY dan bagaimana penyelesaian KIKY tersebut? Pertanyaan di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, dan diyakini bahwa analisis wacana kritis (AWK) mampu membantu 'mengurai permasalahan' itu dari sudut pandang analisis wacana, baik analisis teks, praktik wacana, maupun praktik sosial-budaya. Untuk itulah, dalam pandangan penulis, pendekatan AWK yang tepat untuk membedah persoalan tersebut adalah AWK model Fairclough (1989, 1995).

B. KAJIAN TEORI DAN METODE

Di bawah ini dipaparkan secara singkat karakteristik pendekatan AWK Fairclough berikut metode analisisnya.

1. Karakteristik Pendekatan AWK Model Fairclough

Pendekatan AWK Fairclough berasumsi bahwa bahasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial, saling berhubungan dengan unsur-unsur lain dalam kehidupan sosial, sehingga analisis wacana juga harus memperhatikan persoalan di luar kebahasaan. Wacana sebagai praktik sosial, menurut pandangan Fairclough (1989), mempunyai tiga implikasi: (1) wacana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, (2) wacana merupakan proses sosial, dan (3) wacana berproses sesuai dengan yang dikondisikan dalam masyarakat. Wacana dipengaruhi oleh kondisi sosial, dan sebaliknya kondisi sosial juga dipengaruhi oleh wacana. Berdasarkan implikasi tersebut, Fauzan (2015) berkesimpulan bahwa fenomena linguistik bersifat sosial, sementara fenomena sosial juga bersifat linguistik. Linguistik bersifat sosial karena linguistik sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosialnya. Kondisi sosial juga bersifat linguistik karena aktivitas berbahasa dalam konteks sosial tidak hanya menjadi wujud ekspresi atau refleksi dari proses dan praktik sosial, tetapi juga merupakan bagian dari proses dan praktik sosial tersebut.

Karakteristik AWK, menurut Fairclough (1989, 1995), didukung pula oleh van Dijk (1997, 2008), Fairclough dan Wodak (1997), Eriyanto (2001), Badara (2012), dan Sumarlam (2015) terdiri atas tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

- a. **Tindakan.** Wacana dipahami sebagai tindakan, disosialisasikan sebagai bentuk interaksi yang mempunyai tujuan, diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diungkapkan di luar kesadaran.
- b. **Konteks.** AWK memandang bahasa sebagai praktik sosial, maka Fairclough memposisikan konteks sosial sebagai bagian yang amat penting dalam AWK, dan AWK sendiri menjadi penghubung di antara teks dan konteks sosial. Konteks yang perlu diperhatikan dalam menganalisis wacana adalah konteks situasi sosial, praktik sosial, dan intertekstualitas terjadinya proses saling mempengaruhi secara timbal-balik (dialektik) antara bahasa dan sosial. Van Dijk (2008) membagi konteks menjadi tiga kelompok besar: setting, partisipan, dan peristiwa komunikasi. Wacana harus diperhatikan dari konteks waktu dan tempat kejadian, kaitannya dengan peristiwa masa lampau dan masa depan. Konteks partisipan menunjukkan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu dan identitasnya (raja, wakil raja, putra mahkota, gubernur, mendagri, presiden, wakil rakyat, dll), perannya dalam masyarakat, relasi kekuasaan yang dimiliki (raja dan wakilnya, raja dan kerabatnya, presiden dan rakyatnya, dll), ideologi yang dianut, tujuan berwacana, dan pengetahuan yang dimiliki.

- c. **Historis.** Konteks historis penting dalam AWK. Ketika AWK menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dimengerti tanpa menyertakan konteks yang mengelilinginya. AWK tidak hanya mencari tahu kapan peristiwa itu terjadi, namun juga ingin mengetahui lebih dalam mengapa peristiwa itu terjadi. Situasi sosial politik, suasana pada saat terjadinya peristiwa itu, dan hal-hal lain yang melingkupi terjadinya peristiwa itu merupakan aspek penting dalam konteks historis.
- d. **Kekuasaan.** Konteks kekuasaan menjadi salah satu pembeda utama antara analisis wacana (anawa) dan AWK. Menurut Eriyanto (2001), setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (misalnya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, kekuasaan raja terhadap bawahannya, legislatif terhadap eksekutifnya, dll). Oleh karena itu, AWK tidak membatasi diri pada detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkannya dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Dalam hal ini, kelompok yang dominan (yang memiliki power) memungkinkan membuat kelompok lain (yang tidak memiliki power) bertindak sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya. Demikian juga, yang kuat akan mengontrol/mengendalikan yang lemah, yang berkuasa mengatur yang dikuasai, dst.
- e. **Ideologi.** AWK membidik ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa. Ideologi merupakan kajian sentral dalam AWK. Eriyanto (2001) mengatakan bahwa teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Menurut Badara (2012) ideologi mempunyai dua pengertian yang bertolak belakang, secara positif dan negatif. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Secara negatif, ideologi dipandang sebagai suatu kesadaran palsu, yakni kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Wacana tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah karena pada setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi dan merebut pengaruh.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa AWK tidak hanya bertumpu pada satu anangan tunggal, melainkan selalu multidisiplin. AWK berusaha menyingkap ideologi berdasarkan strategi penggambaran positif terhadap diri sendiri dan penggambaran negatif terhadap pihak lain.

Selanjutnya, AWK ini akan difokuskan pada tiga analisis, yakni analisis teks (deskripsi), analisis praktik wacana (interpretasi), dan analisis praktik sosio-kultural (eksplanasi). Ketiga analisis tersebut dipaparkan sebagai berikut.

a. Analisis Teks (Deskripsi)

Analisis pada tataran deskripsi teks lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa untuk melacak tema-tema yang diangkat dalam pemberitaan yang mencerminkan ideologi. Penggunaan bahasa tersebut meliputi penggunaan kata, metafora, dan struktur kalimat yang digunakan oleh pemroduksi teks.

b. Analisis Praktik Wacana (Interpretasi)

Analisis praktik wacana (proses interpretasi) dilakukan dengan mencari makna hubungan antara interpretasi teks dan interpretasi konteks. Interpretasi teks dilakukan dalam empat tataran: ujaran, makna ujaran, koherensi lokal, dan keutuhan wacana. Pada tataran ujaran (*surface of utterance*), peneliti mengidentifikasi penggunaan kata dan kalimat dengan menggunakan pengetahuan fonologi dan gramatika. Pada tataran makna ujaran (*meaning of utterance*), peneliti mengidentifikasi ujaran dengan menggunakan pengetahuan semantik dan pragmatik. Pada tataran koherensi lokal (*local coherence*), peneliti mengidentifikasi keterkaitan antarkata dan kalimat dengan menggunakan pemahaman pemanfaatan kohesi.

Selanjutnya, pada tataran keutuhan wacana, peneliti mengidentifikasi teks secara global dengan menggunakan skemata.

Interpretasi konteks dilakukan pada dua tataran: konteks situasi dan intertekstualitas. Pada tataran konteks situasi, peneliti mengidentifikasi konteks situasi dengan mengamati pengaruh sosial terhadap teks. Pada tataran intertekstualitas, peneliti menyelidiki intertekstualitas teks dengan membandingkan antara teks yang ada dengan teks yang muncul terlebih dahulu.

c. Analisis Praktik Sosio-Kultural (Eksplanasi)

Analisis praktik sosio-kultural (eksplanasi) merupakan analisis hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial. Analisis ini bertujuan mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tataran deskripsi dan tataran interpretasi. Pada tataran ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan hubungan antara kecenderungan di dalam teks, kompleksitas dalam praktik wacana, dan juga proses-proses di dalam perubahan sosial.

Pada tahap ini, peneliti mencari penjelasan dari hasil penafsiran dengan merujuk pada kondisi sosio-kultural di sekitar teks diproduksi. Kondisi sosio-kultural, menurut Fairclough (1989), dibagi menjadi tiga bagian: situasional, institusional, dan sosial. Situasional adalah situasi unik ketika sebuah teks diciptakan. Institusional adalah pengaruh institusi organisasi terhadap teks yang diproduksi. Sosial adalah hal-hal makro dalam masyarakat, seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau budaya masyarakat.

2. Metode AWK

Kerangka AWK yang dikembangkan oleh Fairclough (1989, 1995) bersifat tiga dimensi (tiga level) yang terdiri atas analisis teks, analisis praktik wacana, serta analisis praktik sosio-kultural. Analisis teks mencakup tiga fungsi, fungsi representasi, relasi, dan identitas. Analisis praktik wacana terkait dengan bagaimana cara memproduksi dan mengonsumsi teks. Praktik sosio-kultural menganalisis tiga hal, yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu kekuasaan dan ideologi), dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media dan wacananya. Pembahasan praktik sosio-budaya meliputi tiga level, yakni level situasional, institusional, dan sosial. Level situasional berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Level institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Level sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

Metode yang dikembangkan meliputi: (1) deskripsi linguistik teks dari segi kebahasaan, (2) interpretasi hubungan antara proses produksi dan konsumsi teks dengan teks (interpretasi hubungan intertekstualitas), dan (3) eksplanasi hubungan antara proses diskursif (produksi dan konsumsi teks) dan proses sosio-kultural. Dengan demikian, analisis Fairclough didasarkan pada bagaimana menghubungkan teks secara mikro dengan konteks masyarakat secara makro.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dipaparkan analisis teks berita terkait dengan KIKY, antara HB X dan adik-adiknya, termasuk adik tirinya (GBPH Prabukusumo), serta pihak-pihak lainnya yang terkait, seperti mendagri, presiden, dan para pakar politik, sosiologi, dan hukum. Paparan diawali dengan deskripsi struktur teks berita, tema teks berita, gramatika teks berita, kemudian diikuti interpretasi, dan dilanjutkan dengan eksplanasi.

1. Deskripsi

a. Deskripsi Struktur Teks Berita

Analisis struktur teks berita terkait dengan struktur retorika yang digunakan oleh pelibat wacana dalam peristiwa komunikasi yang pada umumnya menggunakan pola retorika yang terstruktur, diawali dengan orientasi, disusul inti pembicaraan (*sequence of events*), kemudian diakhiri dengan penutup; atau secara singkat retorika berita terdiri atas bagian pembukaan, isi, dan penutup (Sumarlam, 2013, 2015). Jadi, struktur retorika menampilkan pola penyusunan teks yang tersaji dalam penyusunan bagian pembukaan, inti, dan penutup, serta memberikan petunjuk maksud suatu teks diproduksi, dan memberikan arah mengapa teks diproduksi.

Kajian ini menunjukkan bahwa struktur teks berita mengenai KIKY terdiri atas empat unit wacana, yakni judul berita, orientasi, *sequence of events*, dan penutup. Berikut salah satu contoh teks berita (2) dalam *Tribunnews.com.*, Yogyakarta (6/5/15), berjudul “Pengangkatan GKR Pembayun Jadi Putri Mahkota akan Picu Konflik Internal Keraton”. Konstruksi teks yang dibangun oleh keempat unit wacana tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan membentuk satu kesatuan jenis teks, yakni teks berita.

Unit pertama, judul, berfungsi menunjukkan peristiwa penting yang terjadi. Bagian ini menentukan layak tidaknya sebuah peristiwa diangkat menjadi berita. Teks berita harus menyajikan informasi yang menarik, penting, dan fenomenal. Semakin kontroversial, sebuah berita semakin layak/menarik untuk diekspos.

Unit kedua, orientasi, merupakan bagian yang memperkenalkan inti peristiwa yang diberitakan. Dalam hal ini, inti peristiwanya adalah terjadinya insiden penolakan terhadap “sabda raja”, yaitu keputusan HB X mengangkat putri pertamanya, GKR Pembayun, menjadi Putri Mahkota oleh adik-adik HB X sendiri.

Unit wacana ketiga, *sequence of events*, menjadi bagian paling penting dari teks berita karena bagian inilah yang memaparkan secara utuh dan detail peristiwa utama yang terjadi. Bagian ini meliputi partisipan peristiwa, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Bagian ini juga memuat sumber-sumber informasi pendukung, dapat berupa wawancara, kutipan pernyataan dari narasumber, atau gambar visual yang mendukung informasi mengenai peristiwa yang diberitakan. Pada teks (2) tersebut terdapat satu kutipan pernyataan dari seorang pakar, "Penobatan GKR Pembayun sebagai putri mahkota berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di internal Keraton Yogyakarta dan di masyarakat," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias, Rabu (6/5/2015).

Unit wacana keempat, penutup, berfungsi untuk menutup penyampaian informasi terhadap peristiwa yang terjadi. Misalnya, salah satu teks berita tersebut ditutup dengan sebuah imbauan, saran, atau masukan sebagai berikut. Keluarga keraton harus menempatkan “paugeran” yang telah dijadikan sebagai rujukan selama ratusan tahun sebagai spirit (semangat) dalam menyelesaikan konflik. “Keluarga keraton harus bisa menahan diri karena masih menjadi panutan masyarakat adat Jawa.”

b. Tema Teks Berita

Dari hasil penelusuran di media (internet), ditemukan 8 teks berita berasal dari 6 sumber terkait dengan KIKY. Tema utama yang diangkat adalah KIKY sebagai akibat dari adanya Sabda Raja (*Dhawuh Dalem*) Keraton Yogyakarta dengan beberapa subtema pengembangan. Tema/subtema dimaksud, secara kronologis berdasarkan waktu pemberitaan, adalah sebagai berikut.

- 1) RUU DIY bisa memicu konflik keraton (*Vivanews*, Kamis, 24/2/2011)
- 2) Pengangkatan GKR Pembayun menjadi Putri Mahkota akan memicu KIKY (*Tribunnews.com*, Rabu, 6/5/2015)
- 3) Konflik Yogyakarta sebagai tanda runtuhnya Mataram (*Republika.co.id*, Jumat, 8/5/2015)
- 4) Konflik Keraton Yogyakarta berpotensi menjadi persoalan politik serius (*Rmol*, Senin, 11/5/2015)
- 5) Jika tidak hati-hati, Keraton Yogya bisa seperti Keraton Solo (*Republika.co.id*, Senin, 13/7/2015)
- 6) Pergeseran konflik di Keraton Yogyakarta, dari konflik kepentingan menjadi konflik identitas (*Krjogja.com*, Selasa, 14/7/2015)
- 7) Konflik makin memanas, Keraton Yogyakarta kini punya dua raja? (*Tempo*, Kamis, 16/5/2015)
- 8) Sabda Raja untuk menguji kesetiaan *Abdi Dalem* (*Krjogja.com*, Kamis, 31/12/2015)

c. Gramatika Teks Berita

Gramatika dalam analisis teks berita ini difokuskan pada modalitas, kalimat positif dan negatif yang digunakan dalam teks berita yang diproduksi baik oleh media maupun partisipan atau pelibat wacana. Uraianya adalah sebagai berikut.

Modalitas. Modalitas, menurut Perkins (1983), bukan hanya sikap pembicara/penutur terhadap proposisi, melainkan juga sikap pembicara/penutur terhadap peristiwa. Modalitas merupakan penilaian/sikap penutur, suka atau tidak suka, menolak atau menerima, setuju atau tidak setuju (atau mungkin netral berada di tengahnya), yang mengandung ideologi (gagasan, pendapat, ide, keyakinan) dari penutur. Hal itu menunjukkan pada posisi mana penutur tersebut berpihak. Mengacu pada penelitian Alwi (1992), modalitas yang juga menunjukkan sikap dan pendirian pemroduksi teks dapat diklasifikasikan menjadi empat subkategori, yaitu modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. Dari 8 teks berita yang diamati dapat dikemukakan keempat subkategori modalitas tersebut sebagai berikut.

- a. Modalitas intensional, berhubungan dengan makna ‘keinginan, harapan, ajakan, permintaan’:
 - 1) Di dalam keraton itu cukup heterogen, keluarga-keluarga HB seperti HB IX atau HB VIII juga **ingin mempertahankan eksistensinya**, kata Sunyoto. (Sosiolog UGM). (6/14/7/15)
 - 2) Tetapi yang menjadi sumber kekrisuhan keluarga Sultan Yogya sebenarnya adalah manuver politik Sultan sendiri yang terindikasi **ingin melanggengkan kekuasaannya** di Yogya. (7/16/7/15)
 - 3) Dia (Tb. Abbas Wasih) juga **berharap** agar Keraton Yogyakarta ... tetap berdiri utuh dan terhindar dari gonjang-ganjing. (3/8/5/15)

- b. Modalitas epistemik, berhubungan dengan pengetahuan dan kepercayaan/keyakinan, yang dapat bermakna ‘kemungkinan/keteramalan, keharusan, kepastian’
 - 1) Terkait dengan tanda-tanda Mataram runtuh **mungkin**. Tapi, semuanya kita serahkan kepada Allah swt. (3/8/5/15)
 - 2) Konsep Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY **akan memicu konflik internal** di kalangan Keraton Yogyakarta (1/24/2/11)
 - 3) Menurut Yusril, pengaturan seperti ini **akan membuat ketegangan** dan konflik di kalangan kerabat keraton **akan terus terjadi** (1/24/2/11)
 - 4) ... justru kalau Presiden Jokowi tidak proaktif, **akan berpotensi** menjadi persoalan politik yang serius. (4/11/5/15)
 - 5) Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pemerintah **tidak akan terlibat** dalam urusan internal keraton. (4/11/5/15)
 - 6) Ini kan urusan internal keraton, baik Kemendagri hingga Presiden **tidak akan melibatkan diri**. (4/11/5/15)
 - 7) Jika masing-masing pihak bersikeras, konflik Keraton Solo **akan terulang** di Keraton Yogyakarta. (5/13/7/15)
 - 8) Jika tidak ada pendekatan satu sama lain, momen-momen konflik seperti pengukuhan GBPH Prabukusumo menjadi Sultan XI **akan terus bermunculan**. (5/13/7/15)
 - 9) Mestinya ada ruang negosiasi bersama. Jika tidak, konflik **akan semakin memanas**, ujarnya. (Arie Sudjito, Sosiolog UGM). (5/13/7/15)
 - 10) Mungkin karena Yogya **akan selalu mendapat uang** yang begitu besar dari negara. (7/16/7/15)
 - 11) Dampaknya terhadap NKRI memang kecil, hanya saja secara stabilitas keamanan dan kenyamanan **akan sangat mengganggu**. (7/16/7/15)
 - 12) Karena diindikasikan pihak-pihak di luar keraton **akan memanas suasana dan akan memanfaatkan situasi** ini. (7/16/7/15)
 - 13) ... pihak-pihak yang mengaku masih ada keturunan Pemanahan semakin bernafsu untuk mendapatkan keuntungan dari Yogya, apalagi sebagai daerah istimewa **akan selalu mendapat jatah** setiap tahun yang cukup besar hingga 1.5 T, fantastis, siapa sih yang nggak ngiler? (7/16/7/15)
 - 14) Dikehendaki atau tidak, pemerintah pada akhirnya **akan dipaksa** ikut campur dalam dinamika keraton. (4/11/5/15)

- 15) Sultan X **harus melakukan pendekatan proaktif** kepada adik-adiknya untuk meredam konflik tersebut. (5/13/7/15)
 - 16) Begitu juga adik Sultan juga **harus bisa melakukan dialog** untuk menyelesaikan konflik yang ada. (5/13/7/15)
 - 17) Menurut Sunyoto, upaya yang **harus dilakukan** untuk meredam konflik agar tidak berlarut-larut adalah dengan menghadirkan penengah yang disepakati oleh keluarga keraton. (6/14/5/15).
 - 18) Keluarga keraton **harus menempatkan “paugeran”** yang telah dijadikan sebagai rujukan selama ratusan tahun sebagai spirit (semangat) dalam menyelesaikan konflik. (6/14/5/15).
 - 19) Keluarga keraton juga **harus bisa menahan diri** karena masih menjadi panutan masyarakat Jawa, katanya. (Sunyoto). (6/14/5/15).
 - 20) Sejak pemberlakuan UU Nomor 13/2012 tentang keistimewaan DIY, Sultan dan wakilnya **harus melepas jabatan politiknya** dan larangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, yakni Sri Sultan HB dan Paku Alam untuk berpolitik. (7/16/7/15)
 - 21) Sultan Yogya **harus rela kehilangan** salah satu hak dasar yang dimiliki setiap WNI, yaitu hak pilih dan memilih. (7/16/7/15)
 - 22) Memang tidak mudah didinginkan, sebab masing-masing kubu **pasti ada kelompok yang memprovokasi**, emosional, dan tidak mau kalah. (7/16/7/15)
- c. Modalitas deontik, berhubungan dengan makna ‘kewajiban, izin, perintah/larangan/peringatan’:
- 1) Dalam tradisi politik Melayu di Malaysia, seorang bangsawan **tidak boleh ikut dalam politik**. Kalau dia ikut dalam politik maka hak dia untuk menjadi raja gugur. (1/24/2/11)
 - 2) Sultan Yogya dan Wakilnya **tidak boleh ikut-ikutan berpolitik**. (7/16/7/15)
- d. Modalitas dinamik, berhubungan dengan makna ‘kemampuan’:
- 1) Kalau misalnya kerabat Kesultanan di Yogyakarta juga ikut pemilihan calon gubernur, itu **bisa menimbulkan persoalan sendiri** di internal keraton. (1/24/2/11)
 - 2) Mengenai KIKY **bisa berakibat konflik besar** hingga perpecahan, seperti di Keraton Kasunanan Solo. (5/13/7/15)
 - 3) Keluarga keraton **bisa memilih penengah** yang disepakati. (6/14/5/15)

Ideologi, modalitas, dan kalimat positif/negatif. Kutipan teks berita tersebut memberikan bukti secara tekstual bahwa penggunaan modalitas menjadi salah satu wahana untuk membangun ideologi karena modalitas menunjukkan sikap/penilaian subjektif/kolektif pemroduksi teks berita terhadap suatu peristiwa. Dipandang dari subkategori modalitasnya (baik yang dinyatakan dengan kalimat positif maupun negatif), tampak jelas bahwa penggunaan modalitas epistemik sangat mendominasi pemberitaan mengenai KIKY, yakni 22 data (73%). Sementara itu, penggunaan ketiga modalitas lainnya, yakni modalitas intensional, modalitas deontik, dan modalitas dinamik, total hanya 8 data (27%). Modalitas epistemik merepresentasikan sikap pemroduksi teks terkait dengan pengetahuan dan keyakinan terhadap suatu proposisi dan peristiwa nonfaktual yang berupa ‘kemungkinan atau keteramalan, dan keharusan’. Artinya, terjadinya peristiwa KIKY yang disebabkan oleh sabda raja Sultan HB X itu sangat menarik perhatian berbagai pihak sedemikian rupa sehingga berbagai pihak tersebut memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dan yang seharusnya terjadi pasca di keluarkannya sabda raja tersebut.

Di dalam delapan teks berita yang dikaji ini, pemroduksi teks terdiri atas tiga pihak/kubu utama; yakni kubu Sultan HB X (termasuk Putri Mahkota, GKR Pembayun), kubu adik-adik HB X (termasuk adik tiri HB X, yakni GBPH Prabukusumo), dan pihak birokrat (pejabat

pemerintah) dan para pakar. Ideologi yang dibangun melalui penggunaan modalitas dan kalimat positif/negatif oleh ketiga kubu itu adalah sebagai berikut.

- a) Kubu Sultan HB X dan Putri Mahkota, GKR Pembayun
 - Tidak ditemukan satu pun pernyataan atau kutipan langsung dari kedua tokoh itu pada 8 teks yang ditelaah meskipun semua pemberitaan awalnya bersumber pada sabda raja yang disampaikan oleh HB X.
- b) Kubu adik-adik HB X (termasuk adik tiri HB X, GBPH Prabukusumo)
 - (1) Adik-adik dari Sri Sultan HB X terlihat kecewa atas sikap raja yang dianggap merombak *paugeran* yang ada.
 - (2) Mereka tidak ingin mengumbar 'kekecewaan' itu kepada media. Mereka justru melakukan ziarah ke makam-makam leluhur, seperti ke makam raja-raja Mataram, Imogiri, dan Bantul untuk meminta maaf atas kekhilafan Ngarsa Dalem kepada leluhur.
 - (3) GBPH Prabukusumo akan mengadakan pertemuan dengan keluarga yang lain, termasuk adik-adik dari HB X.
 - (4) Para putra HB IX menyatakan sikap menentang sabda raja dan *dhawuh raja* yang dikeluarkan oleh HB X.
 - (5) Sebelas adik HB X menilai sabda raja yang salah satunya menobatkan GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan *paugeran* baku di Keraton Yogyakarta.
- c) Pihak Pejabat Pemerintah, Pakar Politik, Pakar Sosiologi, dan Pakar Hukum
 - (1) Pemerintah tidak boleh tinggal diam terkait dengan KIKY pasca dikeluarkannya sabda raja dan dhawuh raja oleh Sultan HB X. (AS Hikam)
 - (2) Presiden Jokowi harus proaktif menyikapi KIKY karena di dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta, Gubernur DIY adalah pemimpin utama atau Sultan Keraton, dan gubernur itu di bawah kendali Presiden. (AS Hikam)
 - (3) Pemerintah Pusat tidak akan melibatkan diri dalam urusan internal keraton, dan juga terkait dengan sabda raja mengenai pengangkatan GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota penerus tahta kerajaan Yogyakarta. (Mendagri Tjahjo Kumolo)
 - (4) Mendagri merasa tidak mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan rekomendasi dan saran terkait dengan sabda raja dan rapat keluarga Keraton Yogyakarta. (Mendagri Tjahjo Kumolo)
 - (5) KIKY sesudah sabda raja makin mengeras. Apalagi sekarang orang luar keraton mulai ikut campur. Bahkan ada yang berani mengukuhkan raja baru. (Ketua Dewan Kebudayaan DIY, Djoko Dwiyanto)
 - (6) KIKY dapat menjadi konflik besar dan menimbulkan perpecahan; semua itu bergantung pada Sultan HB X sendiri dan adik-adiknya. (Sosiolog UGM, Arie Sudjito)
 - (7) Keluarga-keluarga HB VIII dan HB IX juga ingin memperjuangkan eksistensinya. (Sosiolog UGM, Sunyoto Usman)
 - (8) KIKY antara lain dipicu adanya RUU DIY yang mengatur bahwa posisi Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama otomatis dijabat oleh Sri Sultan HB dan Paku Alam, tetapi di sisi lain diatur bahwa kerabat kesultanan dapat menjadi calon gubernur DIY; ini rawan konflik internal. (Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra)

Dari sejumlah pernyataan tersebut teridentifikasi produktivitas wacana yang dihasilkan oleh kubu masing-masing. Ternyata, kubu pejabat pemerintah, pakar politik, pakar sosiologi, dan pakar hukum justru paling banyak memproduksi wacana, yakni dengan delapan pernyataan. Kemudian disusul oleh kubu kedua, yakni adik-adik HB X dan GBPH Prabukusumo dengan lima pernyataan; dan yang terakhir kubu Sultan HB X dan GKR Pembayun yang sama sekali tidak memproduksi wacana secara langsung, kecuali hanya satu pernyataan berupa janji bahwa

beliau akan menyampaikan keterangan kepada pers pekan depan terkait dengan sabda raja yang sudah disampaikan secara tertutup di Keraton Yogyakarta. (teks berita 2, Rabu, 6/5/2015). Pada pemberitaan ini juga dapat diketahui bahwa Raja Keraton Yogyakarta itu terlihat bersahaja meski ada beban 'perseteruan' dengan adik-adiknya.

Baik kubu pertama (pejabat pemerintah dan para pakar) maupun kubu kedua (adik-adik HB X dan GBPH Prabukusumo) banyak menyatakan tuturan bernada negatif --memojokkan, menuduh, menyalahkan, melarang, dsb.-- kubu ketiga (Sultan HB X dan GKR Pembayun) dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kosakata bermakna negatif. Misalnya, Sultan HB X dengan sabda rajanya **ingin melanggengkan kekuasaannya, penyebab KIKY, sesudah sabda raja KIKY makin mengeras, tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, harus melepas jabatan politiknya, menimbulkan perpecahan, melanggar paugeran 'peraturan'**, dan sebagainya. Tuturan-tuturan tersebut merepresentasikan ideologi negatif kubu penuturnya, yakni kubu pertama dan kubu kedua.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan analisis praktik wacana, yakni analisis relasi antara teks dan praktik wacana dengan melihat teks sebagai sebuah proses produksi. Interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber interpretasi dan berbagai prinsip penafsiran (Sumarlam, 2013) sehingga dapat menghasilkan suatu penafsiran yang akurat (tingkat kebenarannya tinggi). Selain itu, peneliti/penganalisis juga dapat melakukan kajian intertekstualitas (Fairclough, 1992, 1995), yaitu mengkaji hubungan antara teks berita yang satu dan teks berita lainnya yang gayut, serta konteks yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teks.

Kajian ini didasarkan pada delapan teks berita dari beberapa sumber media. Kedelapan judul berita beserta sumber medianya adalah sebagai berikut.

- (1) Yusril: RUU DIY Bisa Picu Konflik Keraton (*Vivanews*, 24 Februari 2011).
- (2) Pengangkatan GKR Pembayun Jadi Putri Mahkota akan Picu Konflik Internal (*Tribunnews.com*, 6 Mei 2015).
- (3) Konflik Yogyakarta, Kesultanan Banten: Tanda-tanda Mataram Runtuh Mungkin (*Republika.co.id*, 8 Mei 2015).
- (4) AS Hikam Ingatkan Konflik Keraton Yogya Berpotensi Jadi Persoalan Politik Serius (*Rmol*, 11 Mei 2015).
- (5) Jika tidak Hati-hati, Keraton Yogya Bisa Seperti Solo (*Republika.co.id*, 13 Juli 2015).
- (6) Konflik di Keraton Yogyakarta Bergeser (*krjogja.com*, 14 Juli 2015)
- (7) Gawat, Konflik Kian Panas, Keraton Yogyakarta Kini Punya Dua Raja? (*Tempo*, 16 Juli 2015).
- (8) Dawuh Raja Ditujukan bagi Abdi Dalem. (*krjogja.com*, 31 Desember 2015).

Dari delapan judul berita tersebut, hampir semua judul bermuatan nilai negatif. Yang paling netral di antara judul tersebut adalah judul teks (8) "Dawuh Raja Ditujukan bagi Abdi Dalem." Tujuh judul lainnya, seperti tampak di atas, semuanya bernuansa negatif, seperti (1) picu konflik keraton, (2) picu konflik internal, (3) konflik Yogyakarta tanda Mataram runtuh, (4) konflik Keraton Yogya berpotensi jadi persoalan politik serius, (5) hati-hati, Keraton Yogya bisa seperti Solo, (6) konflik Yogyakarta bergeser, dan (7) konflik kian panas.

Interpretasi lebih lanjut terkait dengan KIKY dapat dikemukakan dengan cara melihat hubungan antarteks (kajian intertekstualitas) secara ringkas sebagai berikut. KIKY awalnya terjadi karena Sultan HB X ingin melanggengkan kekuasaannya di Keraton Yogyakarta. Keinginannya itu direpresentasikan melalui sabda raja (*Dhawuh Dalem*). Sabda raja itu berisi (1) perubahan gelar Raja Keraton Yogyakarta, dari Sultan Hamengku Buwono menjadi Sultan Hamengku Bawono (30 April 2015); (2) menetapkan nama baru bagi GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram (5 Mei 2015); (3) pada tanggal yang sama, 5 Mei 2015, GKR Pembayun juga telah ditetapkan sebagai Putri Mahkota.

Itu artinya, GKR Pembayun dipersiapkan untuk diangkat dan dinobatkan sebagai raja di Keraton Yogyakarta. Hal itu dilakukan oleh Sultan HB X karena beliau tidak mempunyai putra

mahkota (anak laki-laki) sebagai pewaris tahta kerajaan Yogyakarta. Sri Sultan HB X mempunyai lima orang anak, perempuan semua. *Kompasiana.com*, 24 Juni 2015, menyebutkan tidak ada *paugeran* ‘peraturan’ tertulis yang melarang anak perempuan menjadi penerus tahta, namun dalam sejarah keraton Yogyakarta (Mataram) belum pernah diperintah oleh seorang ratu. Oleh karena itu, banyak pihak menilai keturunan Sultan HB X tidak bisa naik tahta. Kalau tradisi ini diikuti maka Sultan harus menunjuk salah satu saudara laki-lakinya sebagai mahkota. Penunjukan putra mahkota sepenuhnya menjadi hak prerogatif Sultan.

Konflik memanas ketika kubu penentang sabda raja mengukuhkan Gusti Bendara Pangeran Harya Prabukusumo, adik tiri Sultan HB X, sebagai raja Keraton Yogyakarta, kira-kira dua setengah bulan sesudah sabda raja (*Tempo*, 16/7/2015). Langkah yang mengejutkan ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi bukan lagi KIKY karena sudah ada orang luar keraton yang ikut campur urusan internal.

Hasil interpretasi. Setelah menganalisis teks berita dan menginterpretasikan teks secara intertekstualitas, selanjutnya Fairclough (1989) menyatakan penganalisis sampai pada simpulan untuk menginterpretasikan wacana yang dibangun oleh teks tersebut. Penafsiran yang dilakukan meliputi empat dimensi: (i) apa yang terjadi (*what's going on*), (ii) siapa yang terlibat (*who's involved*), (iii) apa hubungan dengan isu yang diangkat (*what relationships are at issue*), dan (iv) apa peran bahasa (*what's the role of language*). Hasil interpretasi teks berita dari berbagai sumber media dapat dipaparkan sebagai berikut.

- (i) ***What's going on (apa yang terjadi)***. KIKY adalah isu yang sangat menarik karena Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa terkait dengan UU Nomor 12/2012 tentang Keistimewaan DI dan Kota Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Jawa.
- (ii) ***Who's involved (siapa yang terlibat)***. Sri Sultan HB X, GKR Pembayun, adik-adik HB X, GBPH Prabukusumo (adik tiri HB X), kelompok penentang Sabda Raja, pemerintah pusat dan para pakar yang dalam kaitannya dengan KIKY sebagai pemroduksi teks ingin menampilkan citra positifnya di tengah-tengah masyarakat dengan caranya masing-masing.
- (iii) ***What relationships are at issue (apa hubungan dengan isu yang diangkat)***. Media (cetak maupun elektronik), sesuai dengan fungsinya, selalu memberikan informasi dan menyajikan berita yang menarik. Di antara berita yang menarik adalah persoalan-persoalan yang bersifat kontroversial. Bahkan, semakin kontroversial maka berita itu semakin menarik. KIKY adalah salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat pengkonsumsi informasi dan bagi para pihak yang berkepentingan.
- (iv) ***What's the role of language (apa peran bahasa)***. Penggunaan bahasa (struktur teks, struktur kalimat, pemilihan kosakata) dalam teks berita sangat menentukan sikap dan opini para pengkonsumsi (pembaca/pemirsanya). Apabila seseorang (pihak tertentu) diberitakan secara negatif terus-menerus dan berulang-ulang, maka khalayak akan meyakini dan ikut menilai negatif terhadap orang/pihak itu. Sebaliknya, apabila seseorang (pihak tertentu) diberitakan positif secara frekuentatif (berulang-ulang) dan kontinuatif (terus-menerus dalam durasi cukup lama), maka orang itu akan menjadi positif pula citranya di tengah pandangan khalayak. Inilah kekuatan bahasa (*power of language*) yang dimanfaatkan oleh pelibat wacana dan media dalam membangun citra. Para penentang sabda raja dan pendukung GBPH Prabukusumo memproduksi teks berita yang positif bagi dirinya, dan cenderung membangun teks berita yang negatif bagi kubu Sri Sultan HB X.

3. Eksplanasi

Eksplanasi adalah analisis hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial (analisis praktik sosio-kultural). Eksplanasi bertujuan mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap deskripsi dan tahap interpretasi. Pada tataran ini, peneliti menjelaskan hubungan antara kecenderungan di dalam teks, kompleksitas dalam praktik wacana, dan proses di dalam perubahan sosial. Selain itu, peneliti juga menjelaskan hasil penafsiran dengan merujuk pada

kondisi sosio-kultural yang terdiri atas tiga bagian penting, yakni (i) Situasional, yaitu situasi ketika sebuah teks diproduksi. (ii) Institusional, yaitu pengaruh institusi organisasi terhadap teks yang diproduksi. (iii) Sosial, yaitu mengamati hal-hal makro dalam masyarakat terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Indonesia.

Hasil eksplanasi. Paparan hasil eksplanasi terkait dengan kajian ini sebagai berikut.

(i) Proses perubahan situasi

Proses perubahan situasi di Keraton Yogyakarta berlangsung sejak terjadinya peristiwa sabda raja yang disampaikan oleh Sri Sultan HB X pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015, di dalam Keraton Yogyakarta kepada seluruh *abdi dalem* dan *sentana dalem*. Perubahan situasi diawali dengan perubahan gelar Raja Keraton Yogyakarta, dari Sultan Hamengku Buwono menjadi Sultan Hamengku Bawono. Perubahan itu hanya terletak pada kata *buwono* dan *bawono*, dan itu tidak bermakna apa-apa bagi yang tidak tahu karena ketika dicari di dalam kamus bahasa Jawa pun kedua kata itu artinya sama, yakni ‘jagat’, sehingga baik Hamengku Buwono maupun Hamengku Bawono diartikan ‘Pemangku Jagat’. Sebagaimana diketahui bahwa di dunia Jawa dikenal konsep *jagad cilik* ‘jagat kecil’ dan *jagad gedhe* ‘jagat besar’. Oleh karena itu, GBPH Yudhaningrat, salah satu adik Sultan, menilai ada perbedaan makna antara kedua kata itu. *Buwono* yang melekat pada gelar Sultan dimaknai sebagai ‘pemangku bumi’, sedangkan *bawono* maknanya lebih luas dari itu (*solopos.com*, 8/5/2015). Lebih lanjut Yudhaningrat menyatakan “bawono itu makrokosmos seluruh alam semesta.” Apabila diparafrasakan, Hamengku Buwono itu ‘pemangku bumi’ terkait dengan konsep *jagad cilik* (mikrokosmos), sedangkan Hamengku Bawono ‘pemangku seluruh alam semesta’ terkait dengan konsep *jagad gedhe* (makrokosmos). Dengan demikian, di dalam gelar barunya, Sultan Hamengku Bawono tersirat maksud ‘seorang raja/pemimpin yang memangku seluruh alam semesta secara makrokosmos dan mampu menentukan semua kebijakan yang dikehendakinya.’ Perubahan situasi keraton Yogyakarta pun terus berproses ketika Sultan menetapkan nama baru bagi GKR Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Harapan Sultan dengan gelar baru untuk putri sulungnya itu luar biasa jika ditilik dari makna gelar itu, yakni seorang ratu (raja perempuan) yang mampu memangku bumi dan menjaga keselamatan/kebaikan dunia secara abadi di bumi Mataram. Setelah itu, situasi yang semula biasa, menjadi terpicu dengan perubahan gelar, kemudian menjadi memanas dan menimbulkan konflik internal dan eksternal ketika GKR Pembayun dinobatkan sebagai Putri Mahkota. Situasi menjadi semakin “semrawut”, selain dua kali diundang oleh Sultan mereka (adik-adik Sultan) tidak mau datang, juga ditambah penobatan GBPH Prabukusumo sebagai raja Yogyakarta (HB XI) oleh para pendukungnya serta kubu yang anti sabda raja. Masing-masing kubu mengklaim kubunya yang benar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(ii) Proses perubahan institusi

Banyak pihak yang merasa berkepentingan untuk ikut berperan dalam mencari solusi KIKY. Selain pihak yang terlibat sebagai pelaku langsung seperti HB X, GKR Pembayun, adik-adik Sultan, GBPH Prabukusumo, pemerintah dan para pakar politik, sosiologi, dan hukum pun merasa perlu turun tangan sebagai bukti kepeduliannya terhadap penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, institusi media (cetak maupun elektronik, lokal maupun nasional) juga berkepentingan untuk menyuguhkan berita aktual dan informasi terkini dalam membangun opini publik terkait dengan konflik yang terjadi di Keraton Yogyakarta. Penafsiran terhadap UU Nomor 13/2012, tentang Keistimewaan DIY dalam hal menentukan kebijakan dan kewenangannya mengangkat putra mahkota pun menjadi hal yang menarik berbagai pihak. Apakah gubernur DIY yang akan datang merupakan satu paket dengan putra/putri mahkota, ataukah gubernur DIY dan putra/putri mahkota masing-masing berdiri sendiri secara terpisah hak dan kewajibannya menjadi pertanyaan aktual dan faktual yang perlu segera ditemukan jawabannya.

(iii) Proses perubahan sosial

Komunitas internal Keraton Yogyakarta dan sebagian masyarakat Kota Yogyakarta merasa resah dan mengalami kebingungan menyikapi konflik internal yang terjadi di Keraton Yogyakarta. Setakat ini baru sebagian kecil yang mendukung GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota yang bakal menggantikan ayahandanya pada periode yang akan datang. Sebagian besar lainnya, termasuk adik-adik Sultan HB X, GBPH Prabokusumo dan para pendukungnya tidak bersetuju dengan keputusan yang diambil Sultan HB X menobatkan GKR Pembayun sebagai Putri Mahkota.

Keraton Yogyakarta Hadiningrat dipandang sebagai pusat kebudayaan Jawa (*punjering budaya Jawi*) yang memang sudah seharusnya menjadi contoh kehidupan bermasyarakat dan berbudaya bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Konflik internal perebutan kekuasaan yang terjadi di Keraton Yogyakarta yang diekspos berbagai media beberapa tahun terakhir ini dapat menghapus citra positif dan membangun citra negatif bagi para pelakunya. Berdasarkan konteks sosio-kulturalnya diketahui akar permasalahannya bahwa perebutan kekuasaan itu bermula sejak dikeluarkannya sabda raja Sultan HB X. Tentu saja, perseteruan itu akan berdampak pada kelangsungan hidup keraton, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apalagi ditambah dengan turut campur tangannya pihak di luar keraton yang ingin mendominasi dalam memproduksi wacana secara intensif, persuasif, dan represif maka 'perseteruan' internal dan eksternal itu menjadi makin runcing dan persoalannya pun menjadi makin kompleks.

D. SIMPULAN

Kajian ini dilakukan untuk mengungkap representasi kekuasaan yang dibangun oleh kubu HB X, kubu adik-adik HB X, kubu Prabokusumo, serta pihak pemerintah dan pakar pada teks berita di beberapa media mengenai KIKY dengan menggunakan AWK model Fairclough (1989, 1995). Kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut.

1. Struktur teks berita mengenai KIKY terdiri atas empat unit wacana, yakni judul berita, orientasi, *sequence of events*, dan penutup.
2. Penggunaan modalitas di dalam teks berita yang dikaji didominasi oleh modalitas epistemik dibandingkan dengan tiga modalitas lainnya, yaitu modalitas intensional, deontik, dan dinamik. Modalitas epistemik merepresentasikan sikap partisipan terhadap proposisi dan peristiwa dalam hubungannya dengan kemungkinan/keteramalan berupa prediksi-prediksi yang akan terjadi di Keraton Yogyakarta pasca-KIKY, dan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh para pelibat wacana yang berkepentingan. Penggunaan modalitas tersebut di dalam kalimat-kalimat positif atau negatif merepresentasikan ideologi tertentu.
3. Teks berita KIKY yang telah dideskripsikan perlu diinterpretasikan secara intertekstual untuk mencapai simpulan yang lebih komprehensif. Penafsiran meliputi empat dimensi: apa yang terjadi, siapa yang terlibat, apa hubungan dengan isu yang diangkat, dan apa peran/fungsi bahasa dalam peristiwa tersebut.
4. Eksplanasi bertujuan menjelaskan hasil penafsiran pada tahap deskripsi dan interpretasi. Dalam hal ini, penganalisis menjelaskan hasil penafsiran dengan merujuk pada kondisi sosio-kultural yang terdiri atas tiga bagian penting, yaitu (a) situasi ketika teks berita mengenai KIKY itu diproduksi, (b) pengaruh institusi organisasi (tiga kubu yang terlibat) terhadap teks yang diproduksi, dan (c) hal-hal makro dalam masyarakat Keraton Yogyakarta dan sekitarnya terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

REFERENSI

- Alwi, Hasan. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
 Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. 1989. *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman.
- Fairclough, N. 1992. *Discourse and Social Change*. UK and USA: Polity Press.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis*. New York: Addison Wesley Longman.
- Fairclough, N., Mulderrig, J., & Wodak, R. 1997. "Critical Discourse Analysis". dalam van Dijk (ed.), *Discourse Studies: a Multidisciplinary Introduction* (pp. 357 – 378). London: Sage.
- Fauzan, Umar. 2015. "Analisis Wacana Kritis Teks Berita MetroTV dan TvOne Mengenai Luapan Lumpur Sidoarjo." Disertasi, Program Doktor Ilmu Linguistik, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Arnold.
- Perkins, Michael R. 1983. *Modal Expressions in English*. Noorwood: Ablex Publishing Corporation.
- Rani, Abdul. 2005. "Penggunaan Bahasa pada Wacana Iklan Televisi". Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sumarlam. 2013. *Teori dan Praktik Analisis Wacana*. Surakarta: bukuKatta.
- Sumarlam. 2015. "Analisis Wacana Kritis Teks Berita "Mencari Solusi Konflik Keraton Surakarta", dalam *International Conference on Linguistics 2015*, Kamis, 28 Mei 2015, di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran Bandung.
- van Dijk, T.A. 2008. *Discourse and Context: a Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk, T.A. (ed.). 1997. *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies as Multidisciplinary Introduction*.